

PERAN JARINGAN ELIT DALAM PEMBENTUKAN PROVINSI

(Studi Kasus : Aceh Leuser Antara)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Daffa Taqi Abiyyu

NIM. 190801010

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Taqi Abiyyu

NIM : 190801010

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Alamat : Jln.Lembaga, Kec Bebesen, Kab Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2025

Ya

Daffa Taqi Abiyyu

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN JARINGAN ELIT DALAM PEMEKARAN PROVINSI

(Studi Kasus: Aceh Leuser Antara)

Di ajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry
Banda Aceh sebagai Salah satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

Daffa Taqi Abiyyu

190801010

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 14 Maret 2025

A R R A N I R Y
Disetujui Untuk Di Seminarkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muji Mulia M., A.g
NIP: 197403271999031005

Pembimbing II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.
NIDN: 2008048903

PERAN JARINGAN ELIT DALAM PEMEKARAN PROVINSI

(Studi Kasus: Aceh Leuser Antara)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:
Daffa Taqi Abiyyu
NIM : 190801086

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 April 2025
25 Syawal 1446 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muji Mulia, M.Ag.


**Dani Akbar Taqwadin B.IAM.,
M.Sc.**

NIP. 197403271999031005

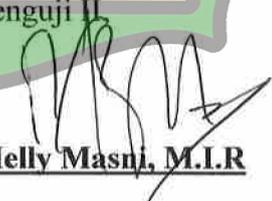
NIDN. 2008048903

A R - R A N I R Y

Penguji I,

Penguji II,


**Muhammad Thalal, Lc., M.Si.,
M.Ed.**


Melly Masni, M.I.R

NIP. 197810162008011011

NIP. 199305242020122016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



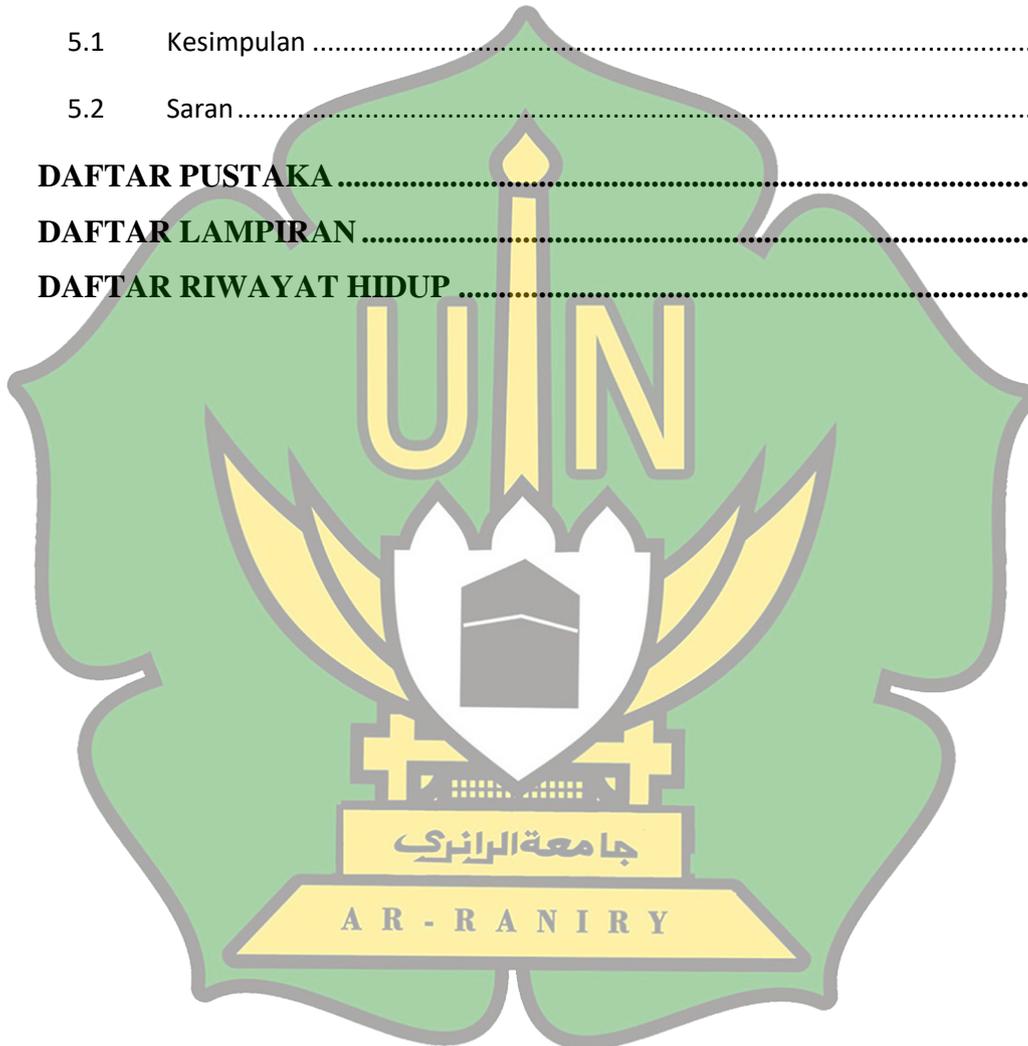
Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1. Teori Elite Network.....	11
2.2.2. Teori interes group	14
BAB III.....	18
METODELOGI PENELITIAN.....	18
3.1 Pendekatan Penelitian	18
3.2 Fokus Penelitian.....	18
3.3 Lokus Penelitian	19
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	19

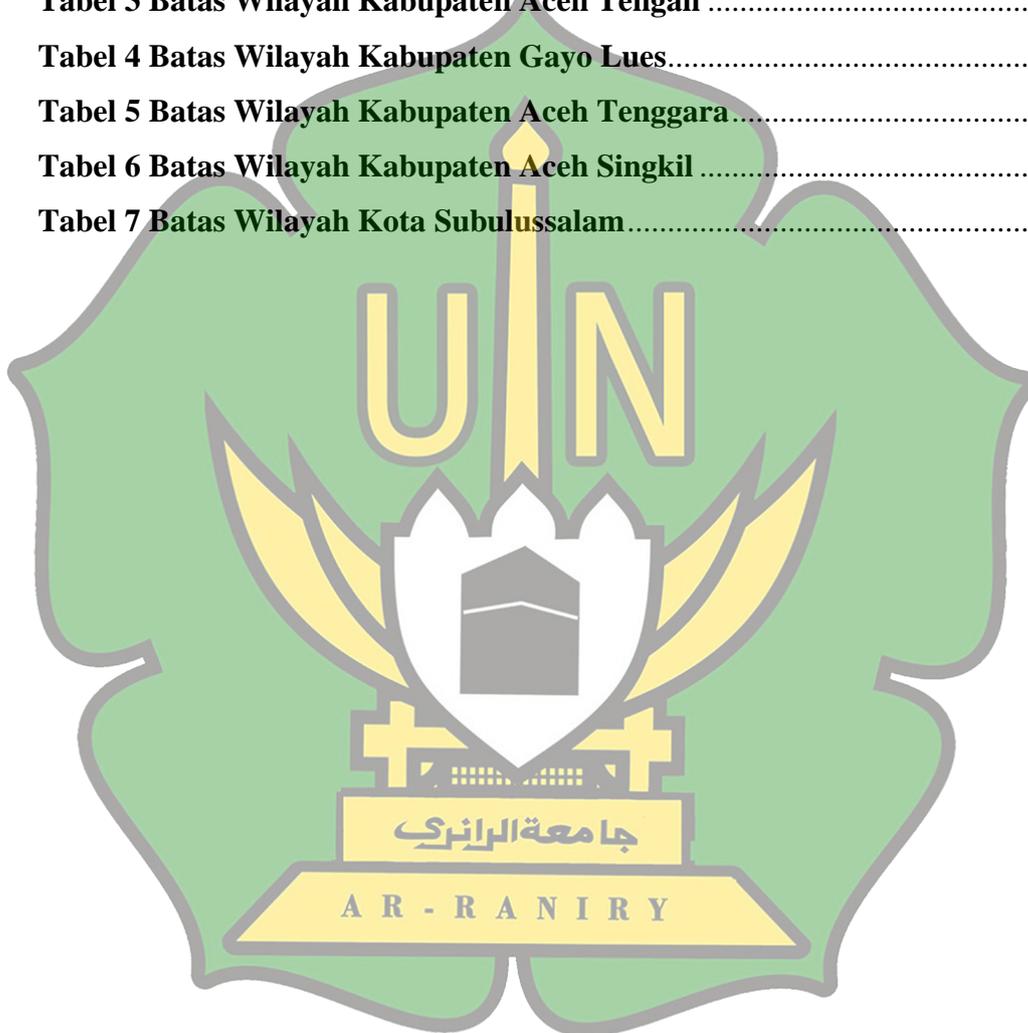
3.5	Informan Penelitian	20
3.6	Teknik Pengumpulan Data	20
3.6.1.	Wawancara.....	21
3.6.2.	Dokumentasi	21
3.6.3.	Kepustakaan	21
3.7	Uji Analisis Data	22
3.8	Teknik Analisis Data	22
BAB IV	24
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	24
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
4.1.1.	Kabupaten Bener Meriah	24
4.1.2.	Kabupaten Aceh Tengah.....	26
4.1.3.	Kabupaten Gayo Lues.....	28
4.1.4.	Kabupaten Aceh Tenggara.....	30
4.1.5.	Kabupaten Aceh Singkil.....	32
4.1.6.	Kota Subulussalam	34
4.2	Identifikasi Jaringan Elit Dalam Proses Pemekaran	36
4.2.1.	Elit Politik.....	37
4.2.2.	Elit Birokrasi.....	38
4.2.3.	Elit Adat.....	40
4.2.4.	Elit Organisasi dan Kelompok Kepentingan	41
4.3	Mekanisme Aksi Kolektif dan Strategi Jaringan Elit.....	44
4.3.1.	Menempuh jalur legislatif dan pemerintah pusat	45
4.3.2.	Menyelenggarakan Seminar Dan Diskusi.....	49
4.3.3.	Aksi Demostrasi	49
4.4	Fragmentasi dan Kompetisi Antar Jaringan Elit.....	50
4.4.1.	Kepentingan Lokal Wilayah	51
4.4.2.	Kompetisi Kepemimpinan dan Representatif Elit Lokal	51
4.5	Evaluasi Peran Elit dan Kepentingan Masyarakat Terhadap Pemekaran ALA	53

4.5.1.	Kepentingan Ekonomi	53
4.5.2.	Kepentingan Politik dan Pembangunan.....	54
BAB V		57
KESIMPULAN		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		61
DAFTAR LAMPIRAN		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		75



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian	20
Tabel 2 Batas Wilayah Kabupaten Bener Meriah	26
Tabel 3 Batas Wilayah Kabupaten Aceh Tengah	28
Tabel 4 Batas Wilayah Kabupaten Gayo Lues.....	30
Tabel 5 Batas Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.....	32
Tabel 6 Batas Wilayah Kabupaten Aceh Singkil	33
Tabel 7 Batas Wilayah Kota Subulussalam.....	36



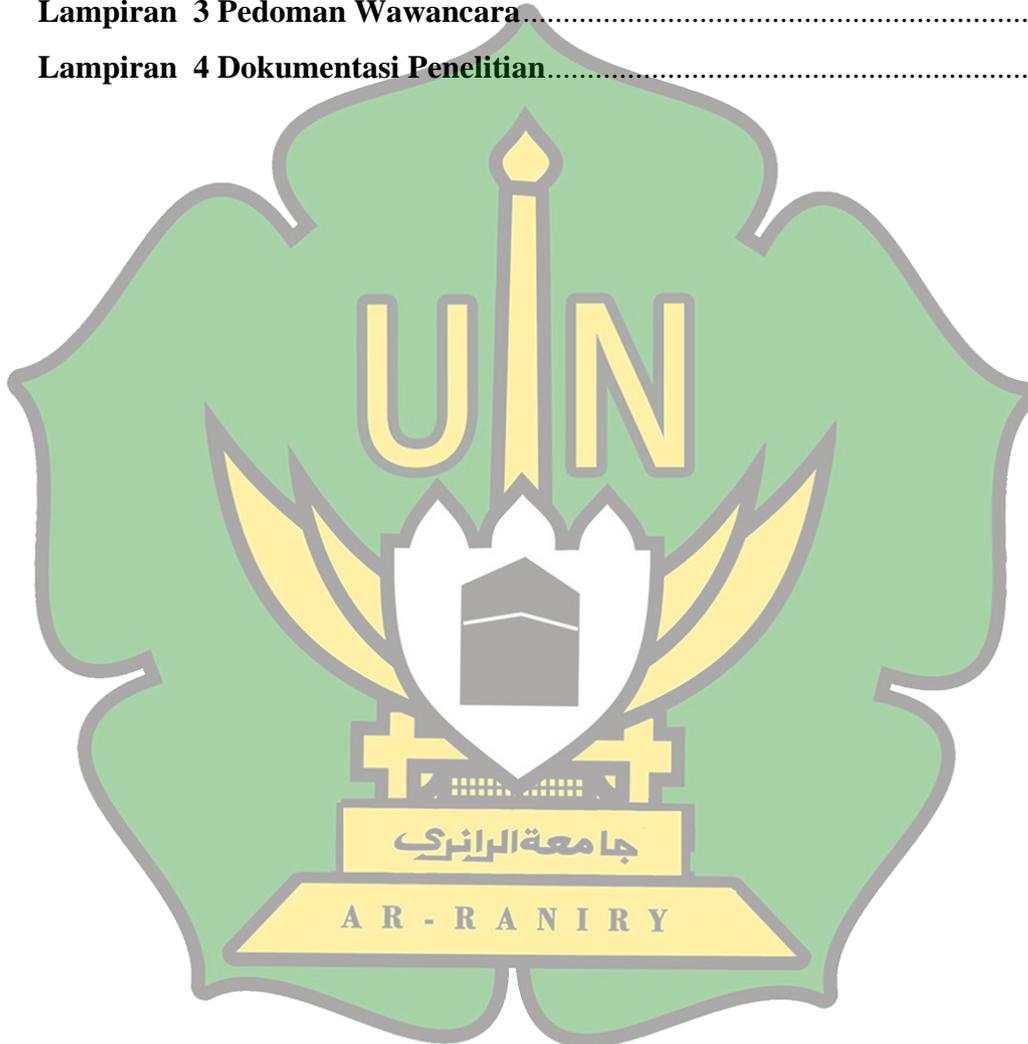
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Aceh Leuser Antara	36
Gambar 2 Rekomendasi Komisi II DPR RI	47
Gambar 3 Pertemuan Tokoh KP3ALA	49
Gambar 4 Aksi Demonstrasi Pejuang ALA di Banda Aceh	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi	63
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	64
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	65
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	72



ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran jaringan elit dalam proses pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara sebagai bagian dari dinamika politik lokal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana aktor-aktor elit, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, membentuk aliansi, memobilisasi sumber daya, dan mempengaruhi kebijakan demi mewujudkan pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, memanfaatkan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder dari dokumen resmi, berita, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara bukan semata-mata didorong oleh kebutuhan administratif atau ekonomi, melainkan merupakan hasil dari dinamika kepentingan politik elit yang membentuk jaringan strategis untuk memperjuangkan agenda pemekaran. Jaringan ini bersifat fleksibel, terdiri atas politisi, tokoh adat, pengusaha lokal, dan akademisi yang memiliki kepentingan berbeda namun bertemu dalam tujuan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Aceh tidak terlepas dari permainan kekuasaan elit, yang menjadikan isu identitas, kesejahteraan, dan keadilan sebagai narasi legitimasi dalam perjuangan politik mereka.

Kata kunci: *jaringan elit, pemekaran wilayah, Aceh Leuser Antara, politik lokal, kekuasaan*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ بِسْمِ

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Swt, atas berkat karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Shalawat beriring salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. yang telah menjadi penerang bagi peradaban dunia.

Selama melakukan penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam Penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa sekali untuk Ayahanda tercinta Husni Tama Sugiarto dan Ibunda Imelda Gayatri beserta seluruh keluarga yang telah memberikan Do'a dan dukungan serta kasih sayang dengan tulus kepada penulis.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini.
5. Bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc. Selaku dosen pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepada bapak dan ibu selaku Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Kepada Ns. Cut Mutia Ramadhani yang telah membantu menyumbangkan pikirannya.
8. Beserta kepada Seluruh keluarga serta kerabat dan juga teman seperjuangan selama ini telah membantu menyusun Skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadi pembelajaran bersama. Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga kripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Banda Aceh, 14 Maret 2025

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Daffa Taqi Abiyyu
190801010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika sosial dan politik, Pemekaran wilayah khususnya pemekaran Provinsi merupakan fenomena politik yang lazim terjadi di Indonesia pasca reformasi. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pemekaran ini adalah keterlibatan jaringan elit di tingkat lokal maupun nasional. Jaringan elit ini terdiri dari aktor politik, birokrat, pengusaha serta tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi dan kedudukan politik yang strategis pada pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Jaringan elit tentunya melirik dan memainkan peran strategis dalam menggalang dukungan, menyusun langkah catur politik dan memobilisasi setiap sumber daya dalam mendorong agenda pemekaran suatu wilayah. Kedudukan jaringan elit dalam proses pemekaran wilayah tidak selalu dinilai positif sebagai cerminan dari kepentingan masyarakat. Banyak fenomena yang menunjukkan bahwa pemekaran menjadi instrumen untuk memperluas kekuasaan, memperkuat patronase politik, serta memperoleh akses terhadap sumber daya dan anggaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang akan terbentuk. Proses ini sering kali dilakukan dengan cara membangun narasi tentang kesenjangan pembangunan, kesejahteraan bahkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh legitimasi dari publik dan pemerintah pusat.¹

Saat memiliki legitimasi publik yang kuat jaringan elit cukup mudah menarik perhatian ketika berhasil menciptakan opini publik, menggalang kekuatan massa dengan sumber daya yang ia punya, hal ini juga disebabkan oleh faktor kedudukan elit di dalam posisi penting dalam birokrasi. Peran jaringan elit juga terlihat dalam bagaimana mereka membentuk koalisi lintas aktor, termasuk melalui jalur formal seperti DPR dan Kementerian, maupun jalur informal seperti hubungan pribadi dan afiliasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran bukan hanya

¹ Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press, 2010.

persoalan administratif dan geografis, melainkan juga arena pertarungan kekuasaan antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan tersendiri.²

Pasca reformasi usulan pemekaran mencuat dari daerah paling ujung barat Indonesia yakni Provinsi Aceh, Usulan mengenai pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang mana persoalan ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Pemekaran ini tentunya di usulkan dengan berbagai alasan yang dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tengah Aceh yang dinilai memiliki suatu karakteristik geografis dan sosial budaya yang berbeda dari wilayah Aceh lainnya .

Wacana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) tentunya memiliki catatan historis serta motif yang cukup panjang yang mencakup wilayah dataran tinggi Gayo-Alas serta daerah lain yang dikenal dengan keaneka ragaman hayati dan kekayaan budayanya. tak hanya itu, wilayah ini juga rentan menghadapi tantangan dalam bentuk kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan kawasan pesisir Aceh. kemudian letak geografis yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Banda Aceh juga menyebabkan kurangnya akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Aspirasi terhadap pemekaran wilayah mulai muncul pada tahun 2000-an pasca berakhirnya konflik bersenjata di Aceh, Jaringan elit memainkan peran sentral dan mendorong pemekaran dengan gagasan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai respon atas persepsi ketimpangan pembangunan dan Wilayah Tengah Gayo-Alas merasa identitas budaya dan kepentingan politik mereka dimarginalisasi dibandingkan Wilayah Pesisir Aceh yang mendominasi pada sektor penting birokrasi khususnya pasca penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).³

² Aspinall, Edward. "The Politics of Patronage and Reform: Political Settlements in Post-New Order Indonesia." *Journal of East Asian Studies*, vol. 14, no. 1, 2014, pp. 1–28

³ ICG (International Crisis Group). *Aceh: Post-Conflict Complications*. Asia Report No. 139. Jakarta/Brussels, 2007

Namun, dibalik narasi keadilan pembangunan dan aspirasi daerah, terdapat kepentingan politik dari aktor-aktor elit lokal yang merasa tidak terakomodir dalam struktur kekuasaan pasca konflik. Wilayah yang tergabung dalam usulan Provinsi ALA seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, secara historis memiliki basis politik yang berbeda dengan kawasan basis GAM. Elit-elit lokal dari wilayah ini merasa termarginalkan oleh dominasi politik kelompok pro-GAM yang menguasai pemerintahan provinsi pasca perdamaian. Selain empat wilayah tersebut Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam adalah dua wilayah yang secara geografis berada di ujung barat daya wilayah yang kerap dikaitkan dengan Aceh Leuser Antara (ALA). Secara administratif, keduanya pernah menjadi satu wilayah, sebelum Subulussalam memisahkan diri dan menjadi kota otonom pada tahun 2007. Keduanya memiliki keterikatan historis dan sosial dengan Aceh Tenggara dan Gayo Lues, yang merupakan bagian inti dari perjuangan ALA. Namun demikian, dukungan dari kedua wilayah ini tidak pernah sepenuhnya solid, dan tidak sekuat dukungan dari wilayah Gayo (Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues) maupun Alas (Aceh Tenggara). Hal ini dikarenakan faktor identitas lokal yang berbeda Masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam mayoritas berasal dari etnis Pakpak, Singkil, dan Mandailing yang secara budaya lebih dekat dengan Sumatera Utara daripada dengan masyarakat Gayo-Alas dan Kekuatan politik lokal, Beberapa elit politik di Subulussalam dan Singkil pernah menyatakan bahwa mereka lebih tertarik memperkuat otonomi daerah daripada bergabung dengan provinsi baru yang belum pasti terbentuk.⁴

Salah satu tokoh yang sentral perjuangan pemekaran yang merupakan ketua presidium (ALA) Mustafa M. Tamy juga merupakan mantan bupati Aceh Tengah pernah menuangkan poin pokok pemikirannya melalui catatan singkat terkait pemekaran (ALA) yaitu pertama, makna pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara bukan bermaksud memisahkan diri dari Aceh tetapi memekarkannya secara administratif, agar dapat membangun lebih cepat, lebih tepat dan lebih akurat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua belah pihak, hal ini sama halnya

⁴ Rohmah, Ummi. "Politik Identitas dalam Gerakan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 23, No. 2, 2019.

antara Jawa Barat dengan Banten, Sulawesi dengan Gorontalo, Riau dengan Kepulauan Riau.⁵

Komposisi jaringan elit pendukung pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) cukup kuat dikarenakan terdiri dari beberapa Kepala daerah yang menjabat pada keempat wilayah itu, anggota legislatif (DPRK), tokoh adat, hingga pengusaha lokal. Jaringan elit lokal ini terus memanfaatkan hubungan politik di tingkat nasional untuk melobi percepatan proses legislasi pemekaran. Elit ini juga membangun narasi tentang identitas kultural masyarakat Gayo-Alas sebagai entitas yang berbeda dari wilayah pesisir, guna memperkuat legitimasi politis agar mempercepat proses pemekaran.

Perjuangan ALA ini juga banyak melibatkan nama elite besar lokal salah satunya Tagore Abubakar merupakan nama yang cukup kuat dikenal di kalangan masyarakat wilayah tengah sebagai nama besar yang mengagas pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sebagai politisi asal Aceh Tengah yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Aceh, Bupati Kabupaten Bener Meriah dan anggota DPR RI, Tagore memainkan peran penting dalam membawa isu ALA ke tingkat legislatif. Ia secara aktif melakukan pendekatan kepada anggota DPR-RI dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dan pemekaran daerah.

Proses pergerakan perjuangan Aceh Leuser Antara (ALA) semakin masif dan sistematis pada tahun 2008 para elit lokal membentuk wadah perjuangan yang lebih terorganisir yaitu Komite percepatan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) yang beranggotakan tokoh adat serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) pendukung pemekaran ini. Organisasi ini dibentuk memiliki fungsi dan peran yang cukup strategis dalam proses penyusunan proposal dan kajian akademik dalam mendukung pemekaran dan ikut andil di dalam ruang publik untuk terus menyuarakan agar pemekaran dapat direalisasikan.

⁵ <https://lintasgayo.co/2020/10/13/tulisan-alm-mustafa-m-tamy-terkait-pemekaran-ala/>

Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) gencar melakukan koordinasi ditingkat elit maupun sipil, hal ini ditandai dengan keterlibatan perwakilan organisasi hadir di dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI . Mereka juga kerap menggalang elemen mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Gayo Merdeka dan pemuda dari keempat wilayah pendukung pemekaran itu untuk gencar melakukan aksi unjuk rasa baik di daerah maupun ibu kota dengan tuntutan percepatan pemekaran.⁶

Perjuangan pembentukan provinsi ALA pastinya memiliki tantangan serta hambatan yang cukup hebat dari berbagai faktor, diantaranya hambatan secara hukum, kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah pusat apakah karena jaringan elit di tingkat pusat kurang memadai maupun persoalan stabilitas politik dan juga pandangan dari masyarakat terhadap wacana pemekaran ini dari segi kepentingan maupun alasan perdamaian, maka dengan landasan tersebut penulis ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana peranan daripada elit dalam pembentukan Provinsi ALA dengan judul “Peran Jaringan Elit Dalam Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara“.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan yang jelas terhadap hal-hal tertentu. Di mana hal itulah yang dijadikan sebagai perhatian dan yang diberi titik fokus untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana peran jaringan elit lokal dalam mendorong usulan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA)?
2. Apa saja motif politik, ekonomi, dan sosial yang mendasari keterlibatan jaringan elit dalam proses pemekaran wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) ?

1.3 Tujuan Penelitian

⁶ Serambi Indonesia. “KP3ALA Desak Pemerintah Segera Realisasikan Pemekaran ALA.” Edisi 2012

Dalam suatu penelitian ilmiah perlu adanya suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ialah acuan terhadap hasil-hasil seperti apakah yang hendak dicapai dari sebuah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi motif sosial politik daripada keterlibatan jaringan elit dalam proses pemekaran wilayah Aceh Leuser Antara (ALA).
2. Menganalisa dinamika dan strategi daripada jaringan elit dalam mendorong usulan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
3. Sebagai referensi penelitian dan memberikan rekomendasi pada proses pemekaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan member manfaat antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu politik, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian peran elit politik dalam proses pemekaran daerah.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya teori jaringan sosial dan elit, terutama dalam konteks pengaruh jaringan elit terhadap perubahan iklim politik dan proses pemekaran wilayah .
3. Secara kelembagaan, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan strategi kelembagaan lokal di wilayah Aceh untuk menyusun strategi efektif dalam memperjuangkan pemekaran yang inklusif dan berkeadilan .